

**IMPLEMENTASIPERATURANDAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM PADA DINAS SOSIAL KOTA
PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 20 AYAT 1)**

OLEH :

NAMA : CINDY PUSPITA SARI

NIM : 20.11.216

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

CINDY PUSPITA SARI, 2024, Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 12 of 2013 Concerning the Guidance of Street Children and Beggars in Public Places at the Social Service on Jalan Kapten A. Rivai, Palembang City (Case Study of Article 20 Paragraph 1), Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Advisor (I) Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si, and Assistant Advisor (II) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si

The large number of homeless people and beggars does make the city look shabby and uncomfortable. As is known, homeless people are people who are uncertain about their place of residence, work and direction of their activities. To get what they want, such as money and goods, homeless people and beggars certainly choose to be in places that are often filled with people. The problem in this study is that there are still many beggars and vagrants scattered due to the lack of guidance carried out by the social service to control beggars and vagrants

Research Objectives To find out how the Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning the Guidance of Street Children and Beggars in Public Places at the Social Service on Jalan Kapten A. Rivai, Palembang City (Case Study Article 20 Paragraph 1) and in this study the author uses qualitative methods, Data Analysis Techniques

The results of the study can be concluded that the guidance of street children and beggars in public places at the Social Service on Jalan Kapten A. Rivai is not optimal, this is due to the low level of awareness of the importance of guidance that will be carried out by the Social Service and a more effective approach is still needed to achieve the desired guidance goals. The factors causing the presence of street children and beggars on Jalan Kapten A. Rivai, Palembang City, the main factor is the economic factor, while other factors are factors of education, and environmental factors. Educational factors that are the decline of street children, due to lack of education taken, and not having enough economy to continue education, and environmental factors, these environmental factors are very easily influenced by street children including children who are easily influenced by adults.

Keywords: Implementation, Guidance for Street Children and Beggars

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu masalah dalam pembangunan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di dunia adalah sekitar 1,4 miliar jiwa dan diperkirakan sekitar 27.000 jiwa meninggal setiap hari karena kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan menjadi senjata pembunuh umat manusia. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi tujuan pembangunan. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah tidak menjadi jaminan rendahnya angka kemiskinan.

Salah satu perkembangan yang menarik ialah bahwa sementara kita negara sedang berkembang bergulat dengan masalah pertumbuhan ekonomi

dan mencoba memahami hubungan antara pertumbuhan dan pembagian, negara maju sibuk dengan soal apakah sumber daya fisik di bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang terus bertambah. Kehancuran sekarang ini akibat penduduk dunia yang terus bertambah tanpa pengendalian, sumber daya yang tidak bisa pulih, bumi yang terus menipis, dan awan padat zat akibat pencemaran bertambah tebal. Disamping itu, kita harus menyadari bahwa penduduk yang sekarang ini kemungkinan besar akan menjadi dua kali lipat pada akhir abad ini sekalipun program keluarga berencana berhasil.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Nyatanya rencana pembangunan nasional negara sedang berkembang

yaitu membuka lapangan kerja adalah tujuan kedua dan bukan tujuan pertama perencanaan. Dengan kata lain, tujuan menciptakan lapangan kerja di anak tirikan. Orang terlalu cepat beranggapan jika laju pertumbuhan ekonomi tinggi dengan sendirinya akan melahirkan lapangan kerja bagi kita semua.

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, yang menyebabkan kesempatan mendapatkan pekerjaan tidak sebanding dengan pertumbuhan yang terjadi. Berbagai kebijakan pemerintah daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun efektifitas masing-masing kebijakan dirasa masih kurang.. Secara ekonomi para gelandangan dan pengemis adalah orang-orang yang berasal dari strata masyarakat bawah. Mereka menjadi gelandangan dan pengemis di dorong oleh kondisi kehidupan yang termarginalkan karena mereka adalah orang-orang yang kalah ketika memasuki arena kompetisi, yang dimata mereka tidak memberikan keadilan sosial.

Banyaknya gelandangan dan pengemis memang membuat wajah kota menjadi terlihat kumuh dan tidak nyaman. Seperti yang diketahui bahwa gelandangan, yaitu orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaan dan arah tujuan kegiatannya. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti uang dan barang, gelandangan dan pengemis tentunya memilih untuk berada di titik-titik yang sering dipenuhi oleh manusia. Seperti di pasar, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, tempat kuliner, terminal, stasiun, dan tempat keramaian lainnya.

Salah satu contoh adalah di Palembang, kawasan yang ramai pengunjung seperti di sekitaran Jl. Kapten A. Rivai yang dekat dengan pusat perbelanjaan yang besar seperti Palembang Icon dan Transmart Palembang. Daerah ini tidak hanya banyak dikunjungi pengunjung, tetapi juga dijadikan lokasi yang tepat bagi gelandangan dan pengemis untuk melangsungkan hidupnya dengan menempati trotoar-trotoar di sekitar Jl. Kapten A.Rivai dan juga sebagai lokasi untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis.

Tabel Data Penjangkauan Anjal, Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, Pengamen dan ODGJ Tahun 2023

Anjal	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Se P	Oct	Nov	Dec	Total
Laki-Laki	6	5	7	1	8	7	12	6	12	5	11	1	81
Perempuan	3	1	9	0	2	0	3	1	4	0	1	3	27
Jumlah	9	6	16	1	10	7	15	7	16	5	12	4	108
Gelandangan													
Laki-Laki	5	21	10	6	4	5	12	29	13	7	10	5	127
Perempuan	1	3	4	2	2	0	5	4	6	3	0	1	31
Jumlah	6	24	14	8	6	5	17	33	19	10	10	6	158
Pengemis													
Laki-Laki	1	3	1	0	1	3	3	4	3	8	7	0	34
Perempuan	0	0	2	1	2	9	6	7	2	1	0	0	30
Jumlah	1	3	3	1	3	12	9	11	5	9	7	0	64
Orang Terlantar													
Laki-Laki	7	0	0	4	7	0	0	0	0	10	0	0	28
Perempuan	4	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	10
Jumlah	11	0	0	7	8	0	0	0	0	12	0	0	38
Pengamen													
Laki-Laki	3	0	2	0	3	2	0	5	2	2	1	0	20
Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah	3	0	2	0	3	2	0	5	3	2	1	0	21
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)													
Laki-Laki	9	12	11	7	7	6	13	23	15	21	7	1	132
Perempuan	5	5	6	1	4	3	5	10	8	1	0	1	49
Jumlah	14	17	17	8	11	9	18	33	23	22	7	2	181
Total Keseluruhan	44	50	52	25	41	35	59	89	66	60	37	12	532

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan tabel pada tahun 2023 jumlah total gelandangan dan pengemis yang terjangkau atau terjaring yaitu sebanyak 222 orang.

Pemerintah kota Palembang memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis yang berada di kota Palembang.

Salah satu tujuan yang dilakukan pemerintah kota Palembang untuk pembinaan gelandangan dan pengemis seperti yang tertuang di Perda Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 3 yaitu “Mencegah semakin meluasnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terutama yang berada di jalanan, tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum”. Tetapi masih banyaknya pengemis dan gelandangan yang tersebar karena kurangnya penjangkauan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk menertibkan pengemis dan gelandangan. Oleh karena itu pemerintah Palembang membuat larangan seperti yang tertuang pada Perda Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 20 ayat (1), yaitu: (1) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan:

- a. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah Daerah;
- b. Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di wilayah Daerah; dan
- c. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan atau di taman dalam wilayah Daerah.

Berdasarkan observasi peneliti pada bulan November 2023 di tempat umum, khususnya di trotoar jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang ditemukan adanya indikasi permasalahan yaitu : Masih banyaknya pengemis dan gelandangan yang tersebar karena kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial untuk menertibkan pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin membahas mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis Di Tempat Umum Pada Dinas Sosial Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 20 Ayat 1)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan anak jalanan dan Pengemis Tempat Umum Pada Dinas Sosial Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 20 Ayat 1)?.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan anak jalanan dan Pengemis Tempat Umum Dinas Sosial Jalan

Kapten A. Rivai Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 20 Ayat 1).

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kajian Implementasi merupakan suatu proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Implementasi Kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal seperti yang diungkapkan oleh Mazmaniah dalam bukunya *“Implementation and Public Policy”* yang diterbitkan pada tahun 1983, mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai: “pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai implementasi kebijakan diatas, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan minimal 4 hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang dijawantahkan dalam proses implementasi
- c. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut
- d. Adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa Implementasi Kebijakan ini menyangkut adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan serta adanya hasil kegiatan.

Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses kedua di dalam perumusan kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan. Dan didalam pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nugroho (2014:243) merumus-

kannya menjadi tiga langkah dengan tujuan agar implementasi akan berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Penerimaan kebijakan.
Pemahaman *public* bahwa kebijakan adalah “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik dan bukan sebagai keistimewaan.
2. Adopsi kebijakan
Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya dilaksanakan dengan baik dan bukan sebagai keistimewaan.
3. Kesiapan Strategis
Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan keeluasaan kebijakan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para ahli.

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model teori Implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Model George Edward III dalam Widodo (2010:96) yang dimana terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian

informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi (*trasmision*) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personel*

responsible for carrying out policies lack the resource to do an effective job, implementing will not effective”

2. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of services that implementor can be provide to public”*.

3. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai *“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”*.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006: 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menanganikeperluan-keperluan publik (*public affair*)

2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa *“implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.*

Pemerintah dalam hal ini adalah yang membuat dan melaksanakan peraturan daerah merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan dan pengaturan berkenaan dengan nilai dasar yang dijelaskan pada konsep tentang masyarakat yaitu mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

1. Yang pertama mengenai tugas pengaturan, jika yang bertugas mengatur adalah pemerintah maka yang diatur adalah yang diperintah dalam hal ini masyarakat.
2. Pengurangan terhadap perilaku eksploitasi dimana Pemerintah Kota Palembang sebagai barometer dari pelaksanaan suatu kebijakan harus menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi kegiatan dari anak jalanan.
3. Melakukan pemberdayaan yaitu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki tiap individu yang dibina.
4. Bimbingan lanjut yaitu salah satu cara pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya.
5. Partisipasi masyarakat disini yang dimaksud adalah tingkah laku masyarakat yang tidak memberikan kebiasaan kepada anak jalanan untuk senantiasa meminta-minta.

Pengertian Anak Jalanan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan *“gepeng”*, masyarakat Indonesia secara

umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar khususnya di Kota Palembang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Menjelaskan, ”gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Kemudian Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, “pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal walaupun itu tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya.

Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 5 dan pasal 6 tentang penanganan gelandangan dan pengemis menjelaskan, gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. Tanpa kartu tanda penduduk.
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap.
- c. Tanpa penghasilan yang tetap.
- d. Tanpa rencana hari kedepan anak-anaknya

maupun dirinya.

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- c. Berada di tempat-tempat umum.
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Namun secara spesifik, karakteristik gelandangan dan pengemis dapat dibagi:

- a. Karakteristik Gelandangan
 1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/ perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
 2. Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
 3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, memintaminta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.
- b. Karakteristik Pengemis
 1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/ perempuan) usia 18-59 tahun.
 2. Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
 3. Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
 4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum fromal, atau tidak bisa dintegrasiakan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang memintaminta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan

kondisi diluar yang bersangkutan. Menurut Dimas Dwi Irawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, yaitu;

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat.

b. Malas Berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih seseorang menjadi gelandangan dan pengemis dibidang kerja.

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

e. Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucu.

f. Mengemis daripada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dari pada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang.

Permasalahan penyebab munculnya masalah sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Masalah Kemiskinan

Secara garis besar gelandangan dan pengemis tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu gelandangan pengemis miskin materi dan gelandangan pengemis miskin mental. Gepeng yang miskin materi adalah mereka yang tidak mempunyai uang atau harta sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis.

Dari pengamatan mengenai kelompok-kelompok miskin di indonesia, maka dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kelompok:

a. Kelompok fakir miskin (termasuk keluarga dan anak yang terlantar)

b. Kelompok informal (termasuk kaki lima, asongan dll)

c. Kelompok petani dan nelayan

d. Kelompok pekerja pasar (termasuk kuli di pelabuhan)

e. Kelompok pegawai negeri dan ABRI, khusus golongan bawah, dan

f. Kelompok pengangguran (termasuk Sarjana)

Sedangkan Parsudi Suparlan menggambarkan dengan terperinci bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari keadilannya sebagai masalah oleh orang yang bersangkutan.

b. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh pada terhadap kesejahteraan seseorang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap persaingan di dunia kerja, oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan. Dalam dunia kerja, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Apabila seseorang berpendidikan rendah dalam arti hanya memiliki ijazah sekolah dasar akan sangat sulit untuk mendapat sebuah pekerjaan yang layak. Sedangkan gelandangan dan pengemis juga memerlukan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Masalah Keterampilan Kerja

Keterampilan sangatlah pening dalam kehidupan, dengan keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada lingkungan sekitar. Potensi diri dapat digalih di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan keterampilan, orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan rendah juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi.

Oleh karena itu, kegiatan menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang

karena harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meminta-minta, dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan bahkan tidak memperdulikannya.

d. Masalah Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya terjadi karna dipikiran para gepeng muncul kecendrungan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis,yaitu:

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
3. Kebebasan dan kesenangan hidup meng-gelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis, karna mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membenahi mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencarian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa benar adanya beberapa faktor sosial budaya yang menjadi

penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Faktor ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum, gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di wilayah yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan hidup berkeliaran di jalan-jalan atau tempat umum serta tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat di kelurahan, RT/RW setempat.

Dari semua faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yang diuraikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan dan pengemis.

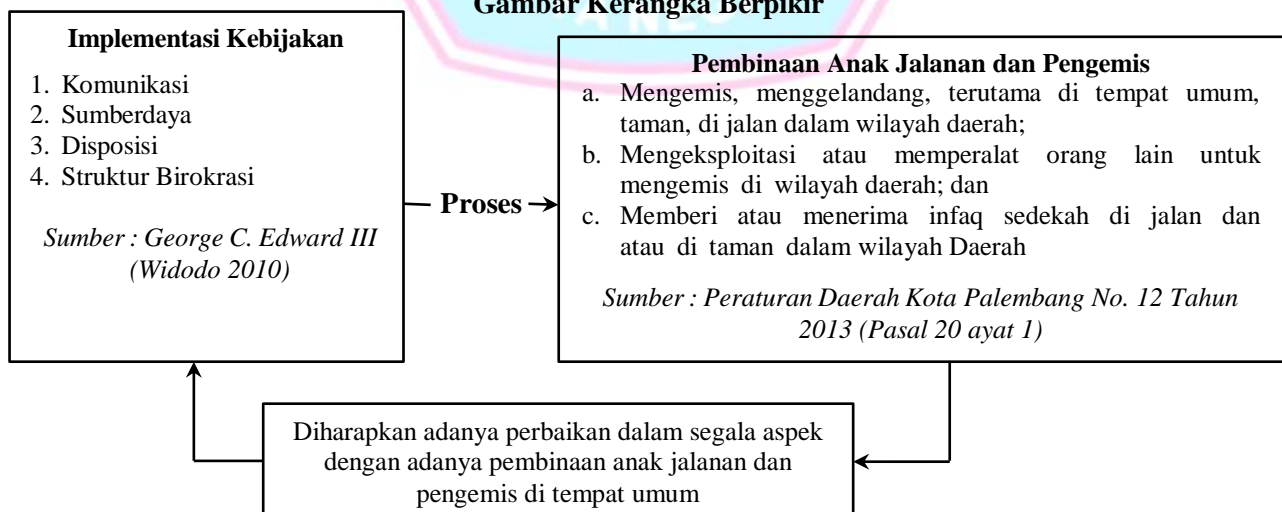
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis di Tempat Umum.

Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemu-kakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dalam skripsi ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Penulis 2024

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, metode penelitian studi kasus

meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus

dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu orang atau individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam tentang Implementasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis di Tempat Umum dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumentasi yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori.

Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) menyatakan konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga.

Untuk mendapatkan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti maka penulis mengemukakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan :

1. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Anak Jalanan dan Pengemis adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan mendapat penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan orang lain.

Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) Definisi Operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan menurut Sujarweni (2014:87) Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.

Untuk mempermudah pelaksanaan operasional dalam penelitian ini, maka dibuat operasionalisasi variabel seperti yang dijabarkan pada tabel.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>Sumber : George C. Edward III (Widodo 2010)</i>	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis <i>Sumber : Perda Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 (Studi Kasus Pasal 20 Ayat 1)</i>	1. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah daerah; 2. Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di wilayah daerah; dan 3. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan atau di taman dalam wilayah daerah

Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan

memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun informan dalam skripsi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Informan Penelitian

No.	Sumber Informasi Penelitian	Jumlah
1.	Kasi Rehab. Sosial Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang	1 orang
2.	Koordinator Lapangan Dinas Sosial Kota Palembang	1 orang
3.	Gelandangan dan Pengemis	3 orang
Total		5 Orang

Sumber: Penulis

Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data.

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian serta fakta yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis yang ada di kota Palembang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang dipergunakan dengan melalui percakapan antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dari informan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data bisa didapatkan dengan melihat-lihat jurnal yang berkaitan, buku-buku, dokumen dari Dinas Sosial Kota Palembang, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis di Tempat Umum.

4. Studi Pustaka

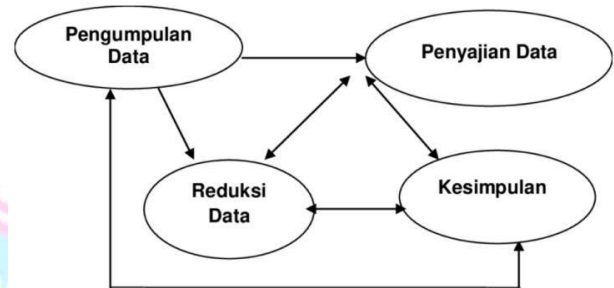
Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell yang dikutip oleh

Rulam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termaksud pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok permasalahannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau mengintrepretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut.

Gambar Teknik Analisa Data



1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis hasil display data, diteliti sekaligus dapat memberikan solusi. Tujuan dari kesimpulan dan verifikasi ini adalah untuk mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palembang dan di Jalan Kapten A. Rivai. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2024. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yakni berupa tanya jawab antara peneliti dengan

informan serta dokumen lain yang menunjang penelitian ini. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung pada objek penelitian.

Wawancara dilakukan dengan mendatangi secara langsung informan di Dinas Sosial Kota

Palembang dan Anak Jalanan dan Pengemis di Jalan Kapten A. Rivai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sebuah proses wawancara sehingga informan dapat lebih jelas dalam memberikan jawabannya.

Tabel Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan/Jabatan
1.	Enos Fendrick, S.E	46	Laki-laki	Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang
2.	An-Nisa, S.Pd	35	Perempuan	Koordinator Lapangan Dinas Sosial Kota Palembang
3.	3 orang	-	-	Anak Jalanan dan Pengemis

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai variabel. Edward III mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi : Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya.
2. Sumber Daya : Tersedianya sumber daya yang memadai (seperti dana, staf, dan peralatan) sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan.
3. Disposisi (Sikap) Pelaksana : Sikap dan persepsi para pelaksana kebijakan sangat memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.
4. Struktur Birokrasi : Struktur organisasi yang ada dan prosedur birokrasi dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

Dalam konteks ini, Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana keempat faktor ini dikelola dan diintegrasikan dengan baik.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan selama penelitian di Dinas Sosial Kota Palembang serta anak jalanan dan pengemis yang berada di Jalan Kapten A. Rivai.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Sosial dan anak jalanan serta pengemis masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal kepercayaan, pemahaman, dan penerimaan terhadap program pembinaan yang ditawarkan. Meski ada upaya persuasif yang dilakukan, masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan

personal untuk mencapai tujuan pembinaan yang diinginkan.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah mengalokasikan sumber daya untuk pembinaan anak jalanan dan pengemis, masih ada keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia. Kebutuhan akan tambahan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan, personel, dan fasilitas penampungan, menjadi perhatian utama.

3. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan pengemis umumnya dianggap baik, dengan pendekatan yang ramah dan penuh empati. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menjaga sikap tersebut, terutama ketika berhadapan dengan penolakan atau ketegangan di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Sosial telah dirancang untuk memastikan kelancaran program pembinaan anak jalanan dan pengemis, namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti proses administrasi yang panjang dan kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan di lapangan.

B. Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis

Pembinaan anak jalanan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi, mendidik, dan memberikan pelayanan sosial kepada anak jalanan dan pengemis dengan tujuan untuk mengurangi

jumlah mereka di jalanan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Pembinaan ini melibatkan serangkaian program dan kegiatan yang dirancang untuk memberikan bantuan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan reintegrasi ke dalam keluarga atau masyarakat. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menghilangkan kondisi yang membuat anak-anak dan pengemis berada di jalan, serta membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil.

1. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2013, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1. Mengemis : Kegiatan meminta-minta uang, barang, atau bantuan lainnya kepada orang lain dengan cara yang tidak sah dan umumnya dilakukan di tempat-tempat umum, seperti jalan, taman, dan tempat keramaian lainnya.
2. Menggelandang : Kegiatan hidup di jalanan tanpa tempat tinggal tetap, pekerjaan, atau sumber penghidupan yang jelas. Orang yang menggelandang biasanya berada di tempat umum dan sering dianggap sebagai pengganggu ketertiban sosial.
3. Di Tempat Umum, Taman, dan Jalan : Wilayah atau lokasi yang terbuka untuk umum, termasuk jalanan, taman kota, dan area publik lainnya yang menjadi pusat aktivitas masyarakat..

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013, yang melarang aktivitas mengemis dan menggelandang di tempat umum, telah diterapkan dengan berbagai tantangan di lapangan. Dari perspektif Dinas Sosial, peraturan ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan peluang pembinaan bagi anak jalanan dan pengemis. Namun, dari sudut pandang mereka yang terlibat dalam aktivitas ini, peraturan tersebut seringkali dirasakan sebagai hambatan tanpa solusi jangka panjang yang memadai.

2. Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di wilayah daerah Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis

Berarti tindakan memanfaatkan atau menggunakan orang lain, terutama yang rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, atau penyandang disabilitas, untuk melakukan kegiatan mengemis

demi keuntungan pribadi.

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa eksploitasi orang lain untuk mengemis, terutama anak-anak dan orang tua, merupakan masalah serius di Kota Palembang. Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 telah menetapkan larangan dan sanksi yang tegas terhadap praktik ini, namun penegakan dan implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Dari perspektif Dinas Sosial, kerja sama dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk menangani pelaku eksploitasi, sementara dari sudut pandang anak jalanan dan pengemis, eksploitasi ini dirasakan sebagai tindakan yang sangat tidak adil dan merugikan.

3. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan atau di taman dalam wilayah daerah

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 yang melarang praktik memberi atau menerima infaq dan sedekah di tempat umum seperti jalan dan taman telah diterapkan dengan tujuan mengurangi ketergantungan pengemis dan pengemis pada sedekah langsung. Dari perspektif Dinas Sosial, larangan ini dimaksudkan untuk mengarahkan bantuan ke saluran yang lebih tepat dan efektif, namun di lapangan, masih ada tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa memberikan sedekah secara langsung..

Pembahasan

Penelitian ini membahas masalah implementasi kebijakan ditinjau dari segi komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, wewenang, dan fasilitas), disposisi terdiri (pengangkatan birokrat dan insentif) dan struktur birokrasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai indikator berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

A. Implementasi Kebijakan

Komunikasi berperan dalam menentukan pencapaian tujuan sebuah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila para pembuat keputusan mengetahui dengan jelas apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Sosial dan anak jalanan serta pengemis masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal

kepercayaan, pemahaman, dan penerimaan terhadap program pembinaan yang ditawarkan. Meski ada upaya persuasif yang dilakukan, masih diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan personal untuk mencapai tujuan pembinaan yang diinginkan.

2. Sumberdaya

Sumber daya adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya dalam konteks ini mencakup semua hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan atau program dengan efektif. Ini termasuk:

1. Dana: Pembiayaan yang cukup untuk mendukung program pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan dan pengemis.
2. Tenaga Kerja: Ketersediaan staf yang terlatih dan kompeten untuk bekerja dengan anak jalanan dan pengemis.
3. Fasilitas dan Peralatan : Infrastruktur fisik seperti tempat penampungan, pusat pelatihan, serta peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung program pembinaan.
4. Waktu : Waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Proses pembinaan sering kali membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah mengalokasikan sumber daya untuk pembinaan anak jalanan dan pengemis, masih ada keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia. Kebutuhan akan tambahan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan, personel, dan fasilitas penampungan, menjadi perhatian utama.

3. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Menurut George C. Edward III, seperti yang dikutip dalam Widodo (2010), Disposisi (Sikap) Pelaksana adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan orientasi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri. Sikap ini mencerminkan bagaimana para pelaksana memahami, menerima, dan bersedia mengimplementasikan kebijakan.

1. Kesiapan untuk Membantu: Para pelaksana kebijakan, seperti petugas sosial atau koordinator lapangan, harus memiliki sikap positif dan komitmen yang kuat untuk benar-benar membantu anak jalanan dan pengemis.
2. Pemahaman tentang Kebijakan: Sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh pemahaman

mereka tentang tujuan dan pentingnya kebijakan. Jika pelaksana memahami mengapa kebijakan tersebut penting untuk anak jalanan dan pengemis, mereka akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka.

3. Respon terhadap Tantangan: Sikap pelaksana terhadap tantangan dan hambatan yang muncul selama implementasi kebijakan juga penting. Pelaksana yang memiliki disposisi positif cenderung lebih kreatif dalam mencari solusi dan tidak mudah menyerah.
4. Interaksi dengan Anak Jalanan dan Pengemis: Disposisi pelaksana memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan anak jalanan dan pengemis. Sikap yang ramah, menghargai, dan tidak menghakimi akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi proses pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan pengemis umumnya dianggap baik, dengan pendekatan yang ramah dan penuh empati. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menjaga sikap tersebut, terutama ketika berhadapan dengan penolakan atau ketegangan di lapangan. Dari perspektif anak jalanan dan pengemis, sikap petugas dinilai cukup baik, namun ada harapan agar petugas lebih memahami situasi mereka dan menunjukkan sikap yang lebih mendukung serta solutif. Ini menandakan bahwa meskipun sikap pelaksana sudah positif, masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan emosional agar program pembinaan lebih efektif dan terasa lebih personal bagi para penerima manfaat.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, sebagaimana dikutip dalam Widodo (2010), struktur birokrasi adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merujuk pada organisasi dan prosedur yang digunakan oleh institusi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan.

Dalam konteks pembinaan anak jalanan dan pengemis, struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan atau program-program terkait dapat diterapkan secara efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dari struktur birokrasi yang relevan:

1. Hierarki dan Tata Kelola: Struktur birokrasi melibatkan tingkat hierarki yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan.
2. Prosedur dan Regulasi: Struktur birokrasi mencakup aturan dan prosedur yang harus

diikuti dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk anak jalanan dan pengemis, prosedur ini bisa mencakup bagaimana mereka diidentifikasi, dirujuk ke layanan yang sesuai, atau bagaimana bantuan disalurkan.

3. Koordinasi Antar Instansi: Struktur birokrasi juga mempengaruhi seberapa baik koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan dan pengemis. Tanpa koordinasi yang baik, program-program tersebut mungkin tidak berjalan dengan efisien.
4. Fleksibilitas: Struktur birokrasi yang kaku bisa menjadi penghalang dalam penanganan isu kompleks seperti anak jalanan dan pengemis. Struktur yang lebih fleksibel memungkinkan penyesuaian kebijakan dan prosedur agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
5. Sumber Daya dan Wewenang: Struktur birokrasi menentukan alokasi sumber daya dan wewenang di dalam organisasi. Dalam konteks anak jalanan dan pengemis, ini berarti siapa yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan sumber daya ke area yang paling membutuhkan, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Sosial telah dirancang untuk memastikan kelancaran program pembinaan anak jalanan dan pengemis, namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti proses administrasi yang panjang dan kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan di lapangan.

B. Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi, mendidik, dan memberikan pelayanan sosial kepada anak jalanan dan pengemis dengan tujuan untuk mengurangi jumlah mereka di jalanan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

1. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2013, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1. Mengemis : Kegiatan meminta-minta uang, barang, atau bantuan lainnya kepada orang lain dengan cara yang tidak sah dan umumnya dilakukan di tempat-tempat umum
2. Menggelandang : Kegiatan hidup di jalanan

tanpa tempat tinggal tetap, pekerjaan, atau sumber penghidupan yang jelas. Orang yang menggelandang biasanya berada di tempat umum dan sering dianggap sebagai pengganggu ketertiban sosial.

3. Di Tempat Umum, Taman, dan Jalan : Wilayah atau lokasi yang terbuka untuk umum, termasuk jalanan, taman kota, dan area publik lainnya yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013, yang melarang aktivitas mengemis dan menggelandang di tempat umum, telah diterapkan dengan berbagai tantangan di lapangan. Dari perspektif Dinas Sosial, peraturan ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan peluang pembinaan bagi pengemis dan gelandangan. Namun, dari sudut pandang mereka yang terlibat dalam aktivitas ini, peraturan tersebut sering kali dirasakan sebagai hambatan tanpa solusi jangka panjang yang memadai.

2. Mengeksploitasi atau memperlak orang lain untuk mengemis di wilayah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksploitasi orang lain untuk mengemis, terutama anak-anak dan orang tua, merupakan masalah serius di Kota Palembang. Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 telah menetapkan larangan dan sanksi yang tegas terhadap praktik ini, namun penegakan dan implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Dari perspektif Dinas Sosial, kerja sama dengan aparat penegak hukum sangat penting untuk menangani pelaku eksploitasi, sementara dari sudut pandang gelandangan dan pengemis, eksploitasi ini dirasakan sebagai tindakan yang sangat tidak adil dan merugikan.

3. Memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan atau di taman dalam wilayah daerah

Tindakan ini diatur dalam peraturan daerah dengan tujuan untuk mengendalikan praktik-praktik yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan infaq dan sedekah, serta menghindari eksploitasi orang-orang yang rentan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kota Palembang No. 12 Tahun 2013 yang melarang praktik memberi atau menerima infaq dan sedekah di tempat umum seperti jalan dan taman telah diterapkan dengan tujuan mengurangi ketergantungan pengemis dan gelandangan pada sedekah langsung. Dari perspektif Dinas Sosial, larangan ini dimaksudkan

untuk mengarahkan bantuan ke saluran yang lebih tepat dan efektif, namun di lapangan, masih ada tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa memberikan sedekah secara langsung. Adapun hasil kesimpulan dan pembahasan adalah bahwasanya penyebab adanya anak jalanan dan pengemis oleh faktor ekonomi, masalah pendidikan, dan lingkungan. Faktor utama yang terjadinya anak jalanan yaitu faktor ekonomi. Karena kurangnya ekonomi membuat anak turun ke jalanan untuk memenuhi kebutuhannya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis Di Tempat Umum Pada Dinas Sosial Jalan Kapten A. Rivai Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 20 Ayat 1) dari setiap indikator yang ada seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih belum optimal, itu disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan masih diperlukan pendekatan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembinaan yang diinginkan. Faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi penyebab anak jalanan dan pengemis turun ke jalanan, karena kurangnya pendidikan yang ditempuh, dan tidak memiliki ekonomi cukup untuk melanjutkan pendidikan, faktor lingkungan ini sangat mudah pengaruh bagi anak jalanan termasuk anak-anak yang mudah dipengaruhi oleh orang dewasa.

Saran

Berdasarkan pembahasan hasil peneliti dan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : untuk anak jalanan diharapkan bahwasanya dikurangi untuk menghabiskan waktu di jalan, menempuh pendidikan melalui pembinaan oleh pihak Dinas Sosial lebih penting dibanding harus mencari nafkah dan bermain di jalan serta bagi pemerintah Kota Palembang dan Dinas Sosial, diharapkan lebih diintensifkan razia anak jalanan dan pengemis, serta diberikan pembinaan yang bersifat motivasi dan inovatif agar anak jalanan dan pengemis dapat tertarik dengan pembinaan yang diberikan supaya mereka dapat mengembangkan kemampuan diri untuk meraih masa depan yang lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Ombak, 2011
- Anshor, Maria Ulfa, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Daliman, A *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak 2012
- Dinas Sosial, *Tugas Pokok, Fungsi Dinas Sosial*, dinsos.tanjabarkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses pada tanggal 18 Oktober 2023
- Endrawati, Netty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, jurnal Ilmu Hukum, 2011
- Hedriansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian*, Repostory STEI Jakarta: Salemba Humainika 2019
- Irawan, Dwi Dimas, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013
- Mardiana, Desi, *Peran Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan*, Makassar: Papalapu, 2016
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid AsySyari'ah*, Palembang: NoerFikri, 2015
- Muhsin, Kalida, *Institution Repository*, Yogyakarta: Alief Press 2003
- R.A Koesnan, *Susunan pidana dalam Negara sosialis Indonesia, sumur*, Jakarta: Sumur Bandung 2007
- Segara (Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan, Kota Mataram) Mataram, 2019
- Soedijar, *Profil Anak Jalanan*, Jakarta: Rineka Cipta 2010
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2012
- Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makasar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penakkukang Kota Makasar*, Laporan Penelitian. Makasar: UIN Alauddin 2017
- Sudrajat, Tata, *Anak Jalanan dan Masalah Kehidupan sampai Kebijakan*, Bandung: Refika Aditama 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta 2018

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana 2010

T. Astrianxanti, *Upaya penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan yayasan setara*, Semarang: Laporan Penelitian. Universitas Negeri Semarang 2017

Undang-Undang Dasar, *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 Ayat 1 No 11 Tahun 2009

Yafie, Alie, *Islam dan Masalah Kemiskinan*, Publisher: Bandung 2007

W.J.S Poerwardaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2006

Sumber Lain :

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba 2012

Kementerian sosial "Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran". <http://www.Indonesia/.ontime.com>, diakses pada tanggal 7 April 2017